

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KAB. INHIL PROVINSI RIAU**

Oleh : RANTI MELASARI

*Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Email: ranti.fonepad7@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode (2009-2014) sebanyak 45 orang yang terdiri dari 4 komisi I, II, III dan IV), pemilihan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 45 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung oleh peneliti sendiri dan melalui perantara orang yang dikenal. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan multiple regression dengan bantuan software SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) yang terdiri dari partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau sebesar 78,8% sedangkan 21,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi antara partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) yaitu $Y = 4,750 + 0,597X_1 + 0,169X_2 + 0,163X_3$. Faktor partisipasi masyarakat adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) yaitu sebesar 59,7%.

Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan, perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} hasilnya adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($36,961 > 2,975$) dengan taraf kesalahan 5%, hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau. Sementara itu dari uji hipotesis secara parsial menunjukkan t_{hitung} partisipasi masyarakat sebesar 7,282, t_{hitung} transparansi kebijakan publik sebesar 2,625, dan t_{hitung} pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 2,321 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,048. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas (partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pengawasan keuangan daerah).

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan di era reformasi ini. Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 diharapkan membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (good governance). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para pimpinan pemerintahan daerah. Seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mensyaratkan perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah.

Ranti Melasari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau

Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah adalah hanya Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Dan yang penting dari itu adalah kedudukan diantara kedua lembaga tersebut bersifat sejajar dan menjadi mitra.

Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah (simon, 2005).

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pasal 40 ayat (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan, menjelaskan bahwa pengawasan adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pasal 40 ayat (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan, menjelaskan bahwa pengawasan adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD harus benar-benar dapat memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah akan mengacu pada kepentingan publik. Pemerintah juga harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati. Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan anggaran atukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Disamping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

II. TELAAH PUSTAKA

2.1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Raharjo (2000) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok yang mendiami suatu wilayah atau negara tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik.

Partisipasi kerap dimaknai sebagai pelaksana rencana pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat hanya sebagai pelaku tanpa ikut terlibat merencanakannya. Lukman Sutrisno (2003) menegaskan definisi partisipasi masyarakat sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh bersama antara eksekutif dan legislatif.

Partisipasi menurut Ramlan (1999:140) adalah keikutsertaan warga negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam negara demokrasi sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.

Partisipasi dapat dibagi atas berbagai macam bentuk. Partisipasi menurut Effendi (2002) terbagi atas partisipasi vertikal dan horizontal, disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain. Dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai posisi bawahan, pengikut atau klien.

Sedangkan partisipasi horizontal adalah masyarakat berpartisipasi satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Peran serta masyarakat sebelum kebijakan publik diterapkan dapat dilakukan melalui pemberian usul dan saran, penyelenggaraan konsultasi publik dan berbagai usulan promosi proyek pembangunan. Setelah kebijakan diterapkan, peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui evaluasi dan pengawasan sehubungan dengan penerapan kebijakan tersebut.

Menurut Latief (2007) Peran serta masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintah demokrasi diperlukan supaya tujuan pembuatan dan penerapan kebijakan publik tidak melenceng dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan yang diambil para pemegang otoritas penyelenggaraan pemerintah tanpa mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan maupun penerapannya sungguh bertentangan dengan hakikat demokrasi.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan sebuah sistem partisipasi yang melibatkan peran serta semua elemen masyarakat.

2.2. Transparansi Kebijakan Publik

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2002:18) Transparansi merupakan salah satu karekteristik pelaksanaan *good governance*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Menurut Werimon (2007) Transparansi kebijakan publik adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki dua aspek yaitu :

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah,
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari :

- a. Adanya sistem pelaporan keuangan;
- b. Adanya sistem pengukuran kinerja;
- c. Dilakukannya auditing sektor publik; dan
- d. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Transparansi dalam laporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Darise, 2007:238).

Menurut Sopanah (2003) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat,
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

2.3. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Indriantoro dan Supomo (2002:5) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat (Truman,1960).

Anggaran merupakan salah satu fungsi DPRD. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah (UU No.32 Tahun 2004 pasal 41 dan 42).

Menurut Budiarto (2002) dalam Pembahasan Anggaran pada tahap pertama dilakukan oleh panitia anggaran untuk dipelajari. Pendapat dan pandangan-pandangan panitia anggaran diserahkan pada komisi-komisi untuk dibahas. Selain rapat komisi, diadakan rapat fraksi untuk membahas rencana anggaran dari aspek politik. Pada pembahasan itu anggota-anggota DPRD dapat mengambil sikap menerima atau mengamander (merubah) bagian-bagian tertentu dalam APBD. Dalam penetapan anggaran tidak pernah terjadi bahwa RAPBD yang diajukan oleh eksekutif diterima begitu saja, walaupun juga tidak pernah terjadi adanya APBD yang ditolak.

Yudono (2002) menyatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta

menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik, dan lain sebagainya.

2.4. Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD

Situmorang dan Juhir (1998) mendefinisikan pengawasan sebagai usaha atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal (1) ayat (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi social kemasyarakatan di daerah sebagai kotrol social (*social control*).

Pengawasan oleh DPRD tersebut tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja, tetapi dilakukan sejak tahap perencanaan. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan (bersama-sama kepala daerah) kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Apabila peranan DPRD tidak signifikan dalam tahap perencanaan, dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemerintah daerah akan mengalami banyak kegagalan dalam pencapaian sasaran maupun penyimpangan. Akan tetapi harus dipahami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap eksekutif daerah bukanlah pemeriksaan, tetapi hanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan (Mulyana, 2006:227).

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

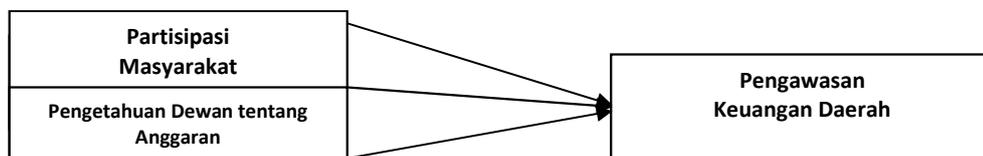
Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk:

- a. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan,
- b. Menjaga agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan
- c. Menjaga agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2.5. Kerangka Konseptual dan Perumusan Hipotesis

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Konseptual



Rumusan masalah, telaah pustaka dan hasil dari penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
- H₂ : Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
- H₃ : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Riau yang berjumlah 45 orang dan terdiri dari 4 komisi. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel yang diambil secara acak berdasarkan strata (*stratified random sampling*). Menurut Hasan (2005:88) stratified random sampling atau sampling berlapis adalah bentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode survei dengan kuesioner (angket). Teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 1998:49).

Peneliti membuat daftar pertanyaan dengan 5 kategori pilihan Skala Likert yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Kuesioner dikirimkan secara langsung kepada masing-masing responden, dari jawaban itu diharapkan akan menemukan hubungan atau pengaruh antara variabel yang dianalisis.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Riau Jl. Soebrantas Tembilahan Inhil Riau.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Adapun variabel-variabel dan definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

2. Partisipasi Masyarakat (X₁)

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan.

3. Transparansi Kebijakan Publik (X₂)

Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai kebijakan publik khususnya APBD oleh pemerintah daerah yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X₃)

Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.

3.5 Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidaksetujuan terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. Sangat Tidak Setuju (STS) | = 1 |
| 2. Tidak Setuju (TS) | = 2 |
| 3. Tidak Tahu (TT) | = 3 |
| 4. Setuju (S) | = 4 |
| 5. Sangat Setuju (SS) | = 5 |

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian (Indiantoro dan Supomo, 2002;179-180). Untuk menentukan apakah dimensi variabel (indikator-indikator variabel) sudah tepat melakukan fungsi ukurnya dengan kata lain instrumen penelitian sudah tepat, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen apa yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen, serta

seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran. Instrumen dikatakan valid jika instrumen sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah analisis korelasi *Product Moment* dari Pearson. Sebuah variabel dikatakan valid apabila dimensi variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dan signifikan untuk membentuk variabel. Sugiyono (1999), syarat validitas data adalah kalau $r > 0,3$. Jadi, kalau korelasi antara butir pertanyaan dengan skor total $< 0,3$ maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan kurang valid.

2. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Suatu instrumen penelitian disebut reliabel apabila instrumen tersebut konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang dia ukur. Jika hasil penilaian yang diberikan oleh instrumen tersebut konsisten, maka memberikan jaminan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya. Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan *Cronbach Alpha*.

3.6.2 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji data memiliki distribusi normal, maka data penelitian harus diuji dulu dengan uji normalitas data. Uji normalitas adalah langkah awal yang dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Pada saat melakukan uji normalitas data, kadang kala kita mendapatkan data yang tidak normal. Data yang tidak terdistribusi normal tersebut dapat ditransformasi agar menjadi normal. Setelah data dinormalkan, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik

Alat diagnosis yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data adalah grafik *Normal Probability Plot*. Plot ini membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal. Jika data memperlihatkan karakteristik normal, titiknya akan berada disekitar garis diagonal. Namun apabila data tersebar menjauhi garis diagonal, maka dapat dipastikan bahwa distribusi data tersebut tidak normal.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antar anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui uji *Durbin Watson*, Secara umum apabila angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif, angka D-W antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak) tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas.

Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis dengan *grafik scatterplots*. Apabila titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y maka dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti dan tidak terdapat kemiripan variabel bebas.

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas maka dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independennya.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel independen (bebas) yang mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (variable dependen), dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \theta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pengawasan Keuangan Daerah

a = Konstanta (intersep)

S₁ – S₃ = Koefisien regresi

X₁ = Partisipasi masyarakat

X₂ = Transparansi Kebijakan publik

Ranti Melasari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau*

X_3 = Pengetahuan dewan tentang Anggaran

e = Kesalahan pengganggu

3.6.5 Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (X) secara parsial terhadap variabel terikat (Y) yang dapat dihitung dengan rumus :

$$t \text{ hitung} = \frac{1}{S_1}$$

Keterangan :

S_1 = koefisien regresi

SS_1 = simpangan baku S_1

Pada tingkat keyakinan 95% atau pada taraf nyata sebesar 5% uji terhadap S_1 dilakukan dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

- a. $H_0 : S_1 = S_2 = \dots S_3 = 0$, menunjukkan bahwa variabel bebas (X_1, X_2, X_3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- b. H_1 : Variabel X_1 (Partisipasi Masyarakat) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengawasan Keuangan Daerah.
- c. H_2 : Variabel X_2 (Transparansi Kebijakan Publik) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengawasan Keuangan Daerah.
- d. H_3 : Variabel X_3 (Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengawasan Keuangan Daerah.

Uji terhadap hipotesis tersebut di atas dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang diteliti.
- b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel tidak bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang diteliti.

2. Uji F (Simultan)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Uji F tersebut dirumuskan dengan :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

k = Banyaknya variabel bebas

n = Jumlah sampel

R^2 = Koefisien determinasi

Pada tingkat keyakinan 95% atau pada taraf nyata sebesar 5% dilakukan uji hipotesis variasi regresi secara simultan dengan menggunakan analisis variasi atau Uji F. Untuk mengetahui signifikansi analisis variasi regresi, dilakukan perbandingan antara nilai F hitung regresi dengan F tabel. Apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang anggota DPRD Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau pada masa jabatan 2009-2014, yang terdiri dari 4 komisi. Dari hasil pendistribusian sebanyak 45 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 33 kuesioner dan 12 kuesioner tidak kembali. 3 kuesioner diputuskan untuk tidak digunakan dalam analisa selanjutnya karena jawaban tidak lengkap. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 30 kuesioner atau sebesar 68% dari jumlah kuesioner yang disebarkan. Rincian tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Distribusi Kuesioner Yang Disebarkan

Kuesioner yang didistribusikan	: 45
Kuesioner tidak kembali	: 12
Kuesioner kembali	: 33
Kuesioner tidak lengkap	: 3
Kuesioner yang diolah	: 30
Respon Rate	: 68 %

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Data demografi responden secara keseluruhan dalam penelitian ini diringkas menurut jenis kelamin, usia, pendidikan tertinggi, asal komisi, dan asal fraksi yang disajikan dalam tabel IV.2 sebagai berikut :

Tabel IV.2 Demografi Responden Penelitian

	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	28	93,33%
	Perempuan	2	6,66%
	Jumlah	30	100%
Usia	30-39 tahun	4	13,33%
	40-49 tahun	14	46,67%
	50-59 tahun	7	23,34%
	60-69 tahun	4	13,33%
	70-79 tahun	1	3,33%
	Jumlah	30	100%
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK/Sederajat	3	10,00%
	Diploma 3 (D3)	1	3,33%
	Strata 1 (S1)	18	60,00%
	Strata 2 (S2)	8	26,67%
	Jumlah	30	100%
Bidang Pendidikan	Ilmu Sosial dan Politik	8	26,67%
	Hukum	6	20,00%
	Ilmu Agama	4	13,33%
	Ekonomi	3	10,000%
	Lainnya	9	30,00%
	Jumlah	30	100%
Asal Komisi	Komisi I	7	23,33%
	Komisi II	10	33,33%
	Komisi III	5	16,67%
	Komisi IV	8	26,67%
	Jumlah	30	100%
Asal Fraksi	Golkar	11	36,67%
	PPP	2	6,66%
	PKB	4	13,33%
	PBR	5	16,67%
	PAN	2	6,67%
	PDI-P	3	10,00%
	Demokrat	3	10,00%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas, dari 30 kuesioner diperoleh informasi bahwa responden laki-laki berjumlah 28 orang (93,33%) dan responden perempuan berjumlah 2 orang (6,66%). Responden yang berumur 30-39 tahun berjumlah 4 orang (13,33%), 40-49 tahun berjumlah 14 orang (46,67%), 50-59 tahun berjumlah 7 orang (23,34%), 60-69 tahun berjumlah 4 orang (13,33%), dan 70-79 tahun berjumlah 1 orang (3,33%).

Responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK/Sederajat berjumlah 3 orang (10%), Diploma 3 (D3) berjumlah 1 orang (3,33%), Strata 1 (S1) berjumlah 18 orang (60%) dan Strata 2 (S2) berjumlah 8 orang (26,67%). Responden yang berasal dari bidang pendidikan ilmu sosial dan politik berjumlah 8 orang

(26,67%), bidang pendidikan hukum berjumlah 6 orang (20%), ilmu agama berjumlah 4 orang (13,33%), ilmu ekonomi berjumlah 3 orang (10%), dan ilmu lainnya berjumlah 9 orang (30%) (Tabel IV.2).

Berdasarkan Tabel IV.2, responden yang berasal dari komisi I berjumlah 7 orang (23,33%), komisi II berjumlah 10 orang (33,33%), komisi III berjumlah 5 orang (16,67%), dan komisi IV berjumlah 8 orang (26,67%).

Responden yang berasal dari fraksi Golkar berjumlah 11 orang (36,67%), fraksi PPP berjumlah 2 orang (6,66%), fraksi PKB berjumlah 4 orang (13,33%), fraksi PBR berjumlah 5 orang (16,67%), fraksi PAN berjumlah 2 orang (6,67%), fraksi PDI-P berjumlah 3 orang (10%), dan Fraksi Demokrat berjumlah 3 orang (10%) (Tabel IV.2).

4.2. Statistik Deskriptif Variabel

Analisis data yang dilakukan terhadap 30 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban dari setiap individu anggota dewan terhadap variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan Dewan tentang anggaran, dan pengawasan keuangan daerah. Statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.3 sebagai berikut :

Tabel IV.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan Keuangan Daerah	30	31,00	38,00	34,5000	1,87083
Partisipasi Masyarakat	30	29,00	37,00	32,8667	2,20866
Transparansi Kebijakan Publik	30	26,00	37,00	30,8667	2,71310
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	30	26,00	35,00	30,1333	2,56949
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 31 dan maksimum 38. Nilai rata-rata responden untuk variabel ini adalah 34,5000 sedangkan standar deviasinya 1,87083.

Partisipasi Masyarakat memiliki nilai minimum 29 dan maksimum 37. Nilai rata-rata jawaban responden untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah 32,8667 dan standar deviasinya 2,20866.

Transparansi kebijakan publik mempunyai nilai minimum 26 dan maksimum 37. Nilai rata-rata jawaban responden untuk variabel Transparansi kebijakan publik adalah 30,8667 sedangkan standar deviasinya 2,71310.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran mempunyai nilai minimum 26 dan maksimum 35. nilai rata-rata jawaban responden untuk variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran adalah 30,1333 dengan standar deviasinya adalah 2,56949.

4.3 Pengujian Kualitas Data

4.3.1. Hasil Uji Validitas

Pegujian Validitas adalah sejauh mana kecepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Untuk menilai ke validan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai *Corrected item-Total Correlation*,

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa suatu item kuesioner dapat dikatakan valid jika *Corrected item-Total Correlation*, memiliki nilai kritis $> 0,3$ atau 30% dengan demikian maka item yang memiliki korelasi $> 30\%$ dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi $< 30\%$ dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil uji validitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.4
Rekapitulasi Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah

Butir Pertanyaan	Corrected Item-total Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,395	0,30	Valid
2	0,346	0,30	Valid
3	0,308	0,30	Valid
4	0,470	0,30	Valid
5	0,384	0,30	Valid
6	0,475	0,30	Valid
7	0,494	0,30	Valid
8	0,393	0,30	Valid

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari Tabel IV.4 terlihat bahwa setiap butir pertanyaan mempunyai kriteria diatas 0.30, dengan demikian secara statistik masing-masing pertanyaan diatas adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian dalam analisis selanjutnya.

Tabel IV.5
Rekapitulasi Uji ValiditasPartisipasi Masyarakat

Butir Pertanyaan	Corrected Item-total Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,380	0,30	Valid
2	0,445	0,30	Valid
3	0,430	0,30	Valid
4	0,353	0,30	Valid
5	0,411	0,30	Valid
6	0,570	0,30	Valid
7	0,397	0,30	Valid
8	0,405	0,30	Valid

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari Tabel IV.5 terlihat bahwa setiap butir pertanyaan memiliki kriteria diatas 0.30, dengan demikian secara statistik masing-masing pertanyaan tersebut adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian dalam analisis selanjutnya.

Tabel IV.6
Rekapitulasi Uji Validitas Transparansi Kebijakan Publik

Butir Pertanyaan	Corrected Item-total Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,433	0,30	Valid
2	0,333	0,30	Valid
3	0,336	0,30	Valid
4	0,425	0,30	Valid
5	0,384	0,30	Valid
6	0,318	0,30	Valid
7	0,358	0,30	Valid
8	0,383	0,30	Valid

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari Tabel IV.6 menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki kreteria diatas 0.30, jadi secara statistik masing-masing pertanyaan tersebut adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian dalam analisis selanjutnya.

Tabel IV.7
Rekapitulasi Uji Validitas Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Butir Pertanyaan	Corrected Item-total Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,472	0,30	Valid
2	0,385	0,30	Valid
3	0,536	0,30	Valid
4	0,491	0,30	Valid
5	0,338	0,30	Valid
6	0,396	0,30	Valid
7	0,548	0,30	Valid
8	0,622	0,30	Valid

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari Tabel IV.7 terlihat bahwa setiap butir pertanyaan mempunyai kriteria lebih besar dari 0.30, jadi secara statistik masing-masing pertanyaan tersebut adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian dalam analisis selanjutnya.

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha*, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 Nunnally (1967) dalam Coryanta (2007). Hasil uji reliabilitas disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel IV. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach'S Alpha	Kriteria	Keterangan
Pengawasan Keuangan Daerah	0,628	0,60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,600	0,60	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik	0,629	0,60	Reliabel
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0,682	0,60	Reliabel

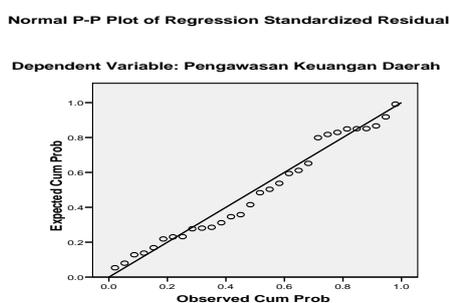
Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Pada Tabel IV.8 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berdasarkan kriteria tersebut, maka semua pertanyaan tentang variabel Pengawasan Keuangan Daerah, Variabel Partisipasi Masyarakat, variabel Transparansi Kebijakan Publik, dan variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, dikatakan reliabel dan layak digunakan sebagai data penelitian.

4.4. Pengujian Normalitas Data

Normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *normal probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1
Grafik Normal Probability plot Variabel Penelitian



Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari Gambar 4.1 diatas terlihat bahwa titik-titik plot menyebar disekitar garis diagonal, dan ini mengasumsikan bahwa data tersebut telah memenuhi asumsi normalitas data.

4.5. Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui korelasi antar data berdasarkan waktu (antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1).

Alat uji yang digunakan adalah *Durbin-Watson Test*. Secara umum, apabila angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif, angka D-W antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, angka D-W diatas + 2 berarti autokorelasi negatif.

Tabel IV.9
Rekapitulasi Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 ^a	.810	.788	.86111	1.860

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

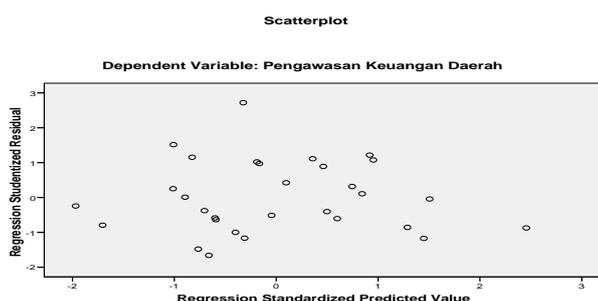
Dari hasil pengujian yang dilakukan (Tabel IV.9), diperoleh angka D-W sebesar 1,860 (antara -2 sampai +2) ini berarti model regresi yang digunakan bebas dari autokorelasi.

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi lain dalam model regresi adalah melihat pengaruh heterokedastisitas dari masing-masing variabel, yang mana hubungan variabel independen dengan residualnya tidak boleh menunjukkan hubungan yang signifikan.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik *Scatterplot*. Apabila titik-titik (data) yang ada pada grafik menyebar, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Tetapi, jika titik-titik (data) tersebut membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 2
Hasil uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian



Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari Grafik 4.2 diatas, terlihat bahwa titi-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, artinya model regres yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

4.5.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model yang diteliti. Multikoliniearitas akan mengakibatkan koefisien regresi tidak pasti atau mengakibatkan kesalahan standarnya menjadi tidak terhingga sehingga menimbulkan bias spesifikasi.

Ranti Melasari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau*

Cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat besarnya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) melalui aplikasi SPSS. Jika VIF > 10 terdapat multikolinearitas dengan variabel lainnya. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10 maka dianggap tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel IV.10
Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas

VARIABEL	Tolerance	VIF	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	0,902	1,109	Bebas
Transparansi Kebijakan Publik	0,838	1,194	Bebas
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0,784	1,275	Bebas

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari Tabel IV.10 diperoleh nilai VIF untuk variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 1,109 (<10), variabel Transparansi Kebijakan Publik sebesar 1,194 (<10), dan variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran sebesar 1,275 (<10), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

4.6. Perumusan Model Regresi

Tabel IV.11
Rekapitulasi Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Koefisien Regresi	F-test (DF=5%)
(constant)	4,750	36,961
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	0,597	
Transparansi Kebijakan Publik (X ₂)	0,169	
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X ₃)	0,163	

Sumber : Data Hasil Olahan, 2011

Dari hasil analisis regresi pada tabel IV.11 diatas, dapat diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 4,750 + 0,597X_1 + 0,169X_2 + 0,163X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, koefisien regresi dari X₁ (Partisipasi Masyarakat) bertanda positif, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Koefisien regresi sebesar 0,597 mengandung arti bahwa apabila faktor yang lainnya konstan maka pertambahan sebesar 100% pada variabel partisipasi masyarakat akan menyebabkan bertambahnya variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 59,7%.

Koefisien regresi variabel X₂ (Transparansi Kebijakan Publik) bertanda positif pada Tabel IV.11, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik sebesar 0,169 mengandung arti bahwa apabila faktor yang lainnya konstan maka pertambahan sebesar 100% pada variabel transparansi kebijakan publik akan menyebabkan bertambahnya variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 16,9%.

Koefisien regresi variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran bertanda positif (Tabel IV.11), menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Koefisien regresi sebesar 0,163 mengandung arti bahwa apabila faktor yang lainnya konstan maka pertambahan sebesar 100% pada variabel pengetahuan dewan tentang anggaran akan menyebabkan bertambahnya variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 16,3%.

Dari ketiga variabel independen yang diteliti, diketahui bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X₁) adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Inhil Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari table IV.11, bahwa untuk variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai koefisien regresi yang terbesar dibanding variabel lainnya yaitu sebesar 0,597 atau 59,7%, artinya variabel partisipasi masyarakat dalam pemerintahan memberikan kontribusi atau nilai tambah yang terbesar terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Inhil Provinsi Riau.

Sedangkan untuk variabel bebas yang paling rendah pengaruhnya terhadap pengawasan keuangan daerah adalah variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran yaitu sebesar 0,163 atau 16,3%, hal ini menunjukkan bahwa *internal control* anggota dewan sangat lemah terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) yang dilakukan olehnya sendiri.

Ranti Melasari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau*

Ketidaktepurnaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan disebabkan karena minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh rata-rata anggota DPRD dibandingkan dengan pihak eksekutif sebagai pihak yang diawasi dan adanya perasaan cepat puas yang dimiliki oleh anggota DPRD. Akibatnya Dewan jarang melakukan peninjauan dilapangan. Biasanya dalam peninjauan tersebut DPRD dapat mengikuti perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif dan Dewan dapat memberikan saran-saran untuk perbaikan dan sumbangan pikiran lainnya secara mendadak atau periodik kepada aparat pemerintahan daerah.

Demi mencapai tingkat fungsional yang memadai maka setiap anggota dprd harus membenahi diri dan mengkaji ulang posisi dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, demi meningkatkan citra DPRD dimasyarakat maka DPRD dituntut untuk bekerja lebih keras.

4.7. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian variabel independen secara individual dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Inhil Provinsi Riau

Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95 % dan taraf signifikansi sebesar 5%. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang diteliti. Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel tidak bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang diteliti.

Tabel IV.12
Koefisien Regresi Variabel Bebas Secara Parsial Terhadap Variabel Terikat

Variabel Bebas	t_{tabel}	t_{hitung}	Significance
X1	2,048	7,828	0,000
X2	2,048	2,625	0,014
X3	2,048	2,321	0,028

Sumber: Data Hasil Olahan, 2011

4.7.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.12, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,828 dan t_{tabel} sebesar 2,048, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya bahwa hipotesis (1) yang menyatakan bahwa "*Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*" dapat diterima. Hasil temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003) dan Coryanata (2007) yang menemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah

Diterimanya hipotesis pertama menunjukkan bahwa semakin tingginya keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses penetapan APBD mulai dari tingkat perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi sampai pengawasan baik langsung maupun tidak langsung akan semakin meningkatkan pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota Dewan yang pada hakikatnya adalah sebagai wakil rakyat.

4.7.2. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Hasil analisis pada Tabel IV.12, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,625 $>$ t_{tabel} sebesar 2,048, artinya bahwa Transparansi Kebijakan Publik mempunyai pengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa "*Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah*" dapat diterima.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) dan Werimon (2007) yang menemukan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah. Perbedaan hasil penelitian ini antara lain disebabkan oleh sampel, lokasi dan wilayah penelitian.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Publik lainnya dalam menetapkan suatu kebijakan publik adalah dengan menyediakan informasi publik yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi sampai pengawasan dan evaluasi. Setiap informasi publik hendaknya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin transparannya kebijakan publik akan mempermudah anggota dewan untuk meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah.

4.7.3. Pengaruh Pengetahuan dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Dari hasil pengolahan data pada Tabel IV.12, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,321 > t_{tabel} sebesar 2,048, artinya bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (3) yang menyatakan bahwa “*Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*” diterima. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu (Sopannah, 2003, Werimon, 2007 dan Coryanata, 2007) yang menemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kualitas anggota dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan Pengawasan keuangan daerah (APBD).

4.7.4. Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji F)

Pembuktian hipotesis secara simultan digunakan untuk menguji apakah variabel bebas (X) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Untuk mengujinya perlu dibandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel IV.13
Hasil Uji Variabel Bebas Secara Simultan Terhadap Variabel Terikat

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	82.221	3	27.407	36.961	.000 ^a
	Residual	19.279	26	.742		
	Total	101.500	29			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : *Data Hasil Olahan, 2011*

Dari hasil pengolahan data pada Tabel IV.13, diperoleh F_{hitung} sebesar 36,961 dan F_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 5%, (k-1) ; (n-k) adalah sebesar 2,975, sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ (36,961 > 2,975). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Pengawasan Keuangan Daerah).

4.7.5. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi perubahan variabel bebas dapat menjelaskan variasi perubahan variabel terikat. Nilai (R²) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel IV.14, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar **0.788** ini berarti bahwa variasi variabel bebas (Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran) dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel terikat (Pengawasan Keuangan Daerah) sebesar **78,8%**, sedangkan sisanya sebesar **21,2%** (100%-78,8%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel IV.14
Rekapitulasi Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 ^a	.810	.788	.86111	1.860

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : *Data Hasil Olahan, 2011*

V. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD), diantaranya adalah partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Kab. Inhil Provinsi Riau.
2. Transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Kab. Inhil Provinsi Riau.
3. Pengetahuan Dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Kab. Inhil Provinsi Riau.

Dari hasil pengujian secara statistik diperoleh bahwa dari faktor partisipasi masyarakat adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, artinya semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam setiap siklus keuangan daerah (APBD), mulai dari perumusan sampai pengawasan maka akan semakin meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD sebagai lembaga yang berwenang dan berkewajiban mewakili kepentingan rakyat.

5.2. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini adalah :

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Pekanbaru, dengan mengambil seluruh komisi (Komisi I, II, III, dan IV), dengan tidak membedakan tugas dan fungsi dari setiap komisi yang membidangi masalah anggaran.
2. Penulis hanya memasukkan tiga variabel yang diduga memiliki hubungan dengan pengawasan keuangan daerah yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Diduga masih ada faktor lain yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Penulis hanya melakukan penelitian pada anggota DPRD di Kab. Inhil saja, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara keseluruhan.

5.3. Saran dan Implikasi

Saran dan implikasi yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mendatang pada saat pengambilan sampel hendaknya memilih sampel anggota dewan yang membidangi masalah anggaran.
2. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan mengikutsertakan masyarakat dalam pemerintahan khususnya masalah APBD sehingga terdapat partisipasi masyarakat didalamnya dan transparan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat benar-benar ikut serta dalam pemerintahan.
3. Bagi partai politik dalam melakukan rekrutmen calon legislatif sebagai perwakilannya hendaknya lebih mempertimbangkan dari sisi pengetahuannya.
4. Bagi anggota Dewan, untuk meningkatkan kinerja hendaknya melaksanakan program pemberdayaan bagi para anggota dewan dalam bidang keuangan baik melalui pelatihan, workshop maupun kegiatan lainnya, sehingga diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, Isma, 2007, *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Makassar : Makalah Simposium Nasional Akuntansi X
- Darise, Nurlan, 2007, *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, Gorontalo : PT. Indeks.
- Hasan, Iqbal, 2001, *Statistik 2*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Indiantoro, Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Ranti Melasari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau*

- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi
- Mulyana, Budi. Subkhan dan Kuwat Slamet, 2006. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta : LPKPAP
- Rahmawaty, Khairida dan Eva Siagian, 2006, *Bentuk Partisipasi Masyarakat Dusun III Tongkoh, Desa Dolat Raya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara terhadap Upaya konservasi di Taman Hutan Raya Bukit Barisan*. Medan : Universitas Sumatera Utara Repository.
- Ramlan, Subakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia
- Sopannah, 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Semarang : Makalah Simposium Nasional Akuntansi V.
- Sugianto, Mikael, 2007, *36 Jam Belajar Komputer SPSS 15*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko, 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPF
- Umar, Husein, 1998, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Werimon, Simson.dkk. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makassar : Makalah Simposium Nasional Akuntansi X.
- Andriano, Rianto. 1999, *Memantau Anggaran Publik*, <http://www.transparansi.or.id>
- Fuad, Nabel, 2005, *Islam dan Pengawasan Melekat*, <http://www.kotasantri.com>
- Khalidun, Ibnu, 2008, *Pengawasan Melekat*, <http://www.google.com>
- Republik Indonesia, 2001, *Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.google.com>
- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Bandung : Citra Umbara,.
- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Bandung : Citra Umbara,.
- Republik Indonesia, 2000, *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, <http://www.google.com>
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, <http://www.google.com>
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta.: Pustaka Pergaulan,
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Jakarta. : Pustaka Pergaulan
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jakarta : Tamita Utama
- Soenandar, Latief, 2007. *Memaknai Peran Partisipasi Publik*, <http://www.google.com>
- Sutikno, Bayu, 2001, *Pengawasan yang Awes* <http://202.149.80.52/user.php>
- Ranti Melasari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau*

Sutrisno, Lukman, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, <http://percik.or.id/index.php>

Ranti Melasari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau